

Info Artikel Diterima September 2020
 Disetujui September 2020
 Dipublikasikan Oktober 2020

**PERTUMBUHAN PENDUDUK DAN ALIH FUNGSI LAHAN
 PERTANIAN**

POPULATION GROWTH AND AGRICULTURAL LAND CONVERSION

Rossi Prabowo^{1,2}, Aziz Nur Bambang², Sudarno²

- 1. Program Studi Agribisnis Universitas Wahid Hasyim Semarang**
- 2. Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro**

E-mail: rossiprabowo@unwahas.ac.id

ABSTRACT

Population growth will be followed by the fulfillment of a residence or settlement so that it will trigger a land conversion. Land conversion or land conversion is defined as a change in the function of part or all of the land area from its original function (as planned) to other functions that have negative impacts (problems) on the environment and the potential of the land itself. According to BPS (2001) in a period of 7 years (1993-2000) there was a reduction in Indonesian agricultural land by 710,000 ha or 56.167 ha per year. As the population in Indonesia increases, it is followed by a decrease in the area of agricultural land due to the process of land conversion to meet residential needs. Land conversion that is carried out directly or indirectly, can be temporary or permanent, can be in the form of gradual conversion with a sporadic pattern, systematic conversion with an "enclave" pattern, land conversion in response to population growth, conversion caused by social problems, conversion without burden and Agricultural adaptation conversion Land conversion is influenced by external factors including economic, socio-cultural, increasing population and regulations, while internal factors such as less productive land and economic pressure from farmers. Conversion of agricultural land has a positive impact in the form of increased investment in the non-agricultural sector but has a negative impact on threatening national food security and decreasing environmental quality.

Keyword: Population Growth, Land, Conversion

ABSTRAK

Pertumbuhan penduduk akan diikuti dengan pemenuhan tempat tinggal atau pemukiman sehingga akan memicu terjadinya alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan didefinisikan sebagai perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang membawa dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Menurut BPS (2001) dalam kurun waktu 7 tahun (1993-2000) terjadi penyusutan lahan pertanian Indonesia

710.000 ha atau 56,167 ha per tahun. Seiring peningkatan jumlah penduduk di Indonesia, maka diikuti penurunan luasan lahan pertanian yang diakibatkan proses konversi lahan guna memenuhi keperluan pemukiman. Alih fungsi lahan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dapat bersifat sementara maupun permanen, dapat berupa konversi gradual berpola sporadic, Konversi sistematis berpola "enclave", Konversi lahan sebagai respon atas pertumbuhan penduduk, Konversi yang disebabkan oleh masalah sosial, Konversi tanpa beban dan Konversi adaptasi agraris. Konversi lahan dipengaruhi oleh faktor eksternal antara lain ekonomi, sosial budaya, peningkatan jumlah penduduk serta regulasi sedangkan faktor internal seperti lahan yang kurang produktif dan desakan ekonomi petani. Konversi lahan pertanian mempunyai dampak positif berupa peningkatan investasi disektor non pertanian tetapi mempunyai dampak negatif terhadap terancamnya ketahanan pangan nasional dan turunnya kualitas lingkungan.

Kata Kunci: Perkembangan Penduduk, Lahan, Konversi

PENDAHULUAN

Peningkatan jumlah penduduk di Indonesia melonjak cukup signifikan. Peningkatan jumlah penduduk tentunya juga diikuti dengan peningkatan pembangunan pemukiman perumahan. Alih fungsi lahan atau lazimnya disebut konversi lahan didefinisikan sebagai perubahan sebagian atau seluruh fungsi lahan dari fungsi yang direncanakan menjadi fungsi lain yang membawa dampak negatif bagi lingkungan. Pertambahan dan pertumbuhan penduduk akan berdampak pada upaya pemenuhan kebutuhannya, kebutuhan tersebut antara lain kebutuhan perumahan dan tempat kegiatan ekonomi seperti pabrik, pertokoan, pasar dan lain-lain. Sebagai akibatnya terjadi persaingan yang ketat dalam pemanfaatan lahan yang berakibat pada meningkatnya nilai lahan (*landrent*) maka penggunaan lahan untuk pertanian akan selalu dikalahkan dengan cara menggeser lahan pertanian ke non pertanian seperti industri dan perumahan (Nasoetion dan Winoto, 1996).

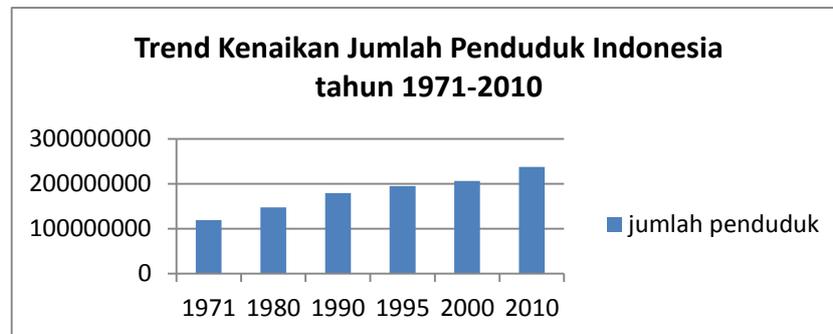
Pada internal sektor pertanian, usahatani sendiri belum mendukung ke arah pelaksanaan pertanian berkelanjutan (Prabowo, 2010). Sempitnya rata-rata luas lahan pertanian yang diusahakan petani yang diakibatkan sistem waris pecah-bagi membuat kegiatan usaha tani semakin termarginalkan. Kecilnya lahan pertanian berakibat pada kecilnya nilai produktifitas pertanian. Usaha pertanian kemudian dinilai tidak menguntungkan dan berujung pada penjualan lahan pertanian untuk penggunaan lainnya (alih fungsi lahan pertanian).

Konversi lahan pertanian terjadi disebabkan adanya persaingan dalam pemanfaatan lahan antara sektor pertanian dan sektor non pertanian akibat adanya tiga fenomena ekonomi dan sosial, yaitu keterbatasan sumberdaya alam, pertumbuhan penduduk, dan pertumbuhan ekonomi. Luas lahan tidak akan pernah bertambah luas akan tetapi permintaan terhadap tanah terus meningkat untuk sektor non pertanian. Proses konversi yang terjadi di Indonesia dari tahun ketahun menunjukkan jumlah yang semakin meningkat. Hal ini akan berdampak padaberkurangnya jumlah lahan untuk pertanian. BPS (2001) menyebutkan dalam

kurun waktu tujuh tahun (1993 -2000) terjadi penyusutan lahan pertanian seluas 710.000 ha, atau terjadi penyusutan rata rata per tahun seluas 56,167 ha. Untuk itu perlu kajian mengenai tren alih fungsi lahan pertanian, pola, karakteristik dan dampak dari alih fungsi lahan pertanian di Indonesia.

Perkembangan Penduduk Indonesia

Jumlah penduduk Indonesia tahun 2000 sebanyak 206.264.595 jiwa dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 237.647.326 jiwa (BPS Pusat, 2010). Selanjutnya BPS juga memproyeksikan peningkatan jumlah penduduk Indonesia sampai tahun 2020 menjadi sebanyak 271.066.400 jiwa. Laju kepadatan penduduk sebagai indikator bertambahnya luasan pemukiman bagi penduduk Indonesia juga menunjukkan peningkatan, pada tahun 2000 rata rata laju kepadatan penduduk sebesar 107 orang/km², kemudian pada tahun 2010 rata rata laju kepadatan penduduk meningkat menjadi 124 orang/km² dan pada tahun 2015 rata rata laju kepadatan penduduk sebesar 134 orang/km².



Gambar 1. Diagram Trend Kenaikan Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 1971-2010

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk maka akan diikuti dengan upaya pemenuhan sandang dan papan. Seiring peningkatan jumlah penduduk maka pemukiman penduduk juga akan semakin meningkat. Dari sini dapat diartikan bahwa peningkatan jumlah penduduk yang diikuti upaya pemenuhan tempat tinggal akan berpotensi meningkatnya alih fungsi lahan. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola dan karakteristik alih fungsi lahan pertanian, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian dan bagaimana dampak alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian

METODOLOGI

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data adalah studi pustaka. Metode yang akan digunakan untuk pengkajian ini studi literatur. Data yang diperoleh dikompulsi, dianalisis, dan disimpulkan sehingga mendapatkan kesimpulan mengenai studi literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alih Fungsi Lahan Pertanian Indonesia

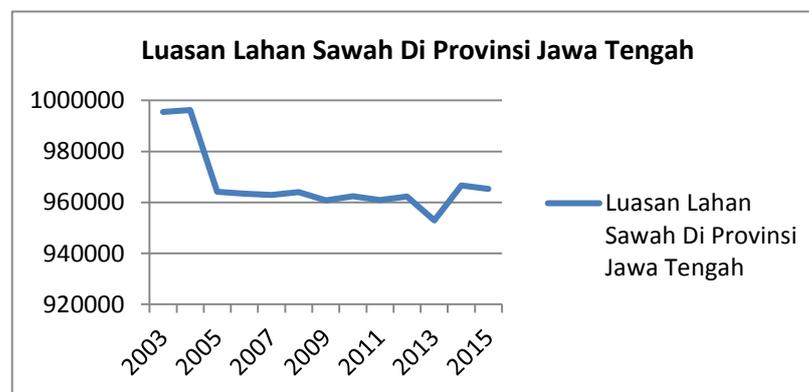
Alih fungsi lahan atau konversi lahan adalah berubahnya satu penggunaan lahan ke penggunaan lainnya, sehingga permasalahan yang timbul banyak terkait

dengan kebijakan tata guna lahan (Ruswandi, 2005). Alih fungsi lahan ini secara umum menyangkut transformasi dalam pengalokasian sumberdaya lahan dari satu penggunaan ke penggunaan lainnya. Hal ini umumnya terjadi di wilayah sekitar perkotaan dan dimaksudkan untuk mendukung perkembangan sektor industri dan jasa. Alih fungsi lahan pertanian sebenarnya bukan merupakan hal baru di Indonesia.

Isu yang berkaitan dengan alih fungsi lahan pertanian marak diperdebatkan sejak diterbitkannya hasil sensus pertanian yang mengungkapkan bahwa antara tahun 1983 hingga 1993 telah terjadi penyusutan lahan sawah sebesar 1,28 juta hektar. Kondisi seperti ini sulit dihindari karena pemanfaatan lahan untuk kegiatan non pertanian lebih memberikan keuntungan finansial dibandingkan pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian. Hal ini tercermin pada nilai *land rent* untuk kegiatan pertanian yang cenderung lebih kecil dibandingkan untuk kegiatan non pertanian.



Gambar 2. Proses Konversi Lahan Pertanian Menjadi Pemukiman.
(Anonim 2019)



Gambar 3. Diagram Trend Luas Lahan Sawah Di Provinsi Jawa Tengah
(BPS 2019)

Luasan lahan pertanian di Indonesia tahun 2003 sampai dengan 2015 mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan program kebijakan strategis perluasan

areal pertanian baru yang dicanangkan oleh pemerintah. Hanya saja, program tersebut hanya efektif untuk wilayah luar Jawa dikarenakan masih tersedianya lahan tidak produktif yang cukup luas, sedangkan di Pulau Jawa terjadi penurunan jumlah luasan sawah.

Tabel 1. Luas lahan Sawah Di Indonesia Tahun 2012

Luas Lahan Sawah di Indonesia 2012							
No	Provinsi	Total sawah		Sawah non irigasi		Sawah beririgasi	
		Ha	%	Ha	%	Ha	%
	Nangroe Aceh						
1	Darussalam	286.270	3,22	57.350	3,61	228.920	3,13
2	Sumatera Utara	542.380	6,06	93.050	5,86	449,33	6,14
3	Riau	75.000	0,84	60.740	3,82	14.260	0,19
4	Sumatera Barat	266.980	3	1.170	0,07	265.810	3,63
5	Jambi	97.720	1,1	25.670	1,62	72.050	0,98
6	Sumareta Selatan	415.800	4,67	111.290	7,01	304.510	4,16
7	Bangka Belitung	10.650	0,12	10.650	0,67	-	-
8	Bengkulu	50.120	0,56	-	-	50.120	0,69
9	Lampung	291.770	3,28	54.860	3,45	236.910	3,24
	Sumatera	2.036.690	22,9	414.780	26,11	1.621.910	22,17
10	DKI Jakarta	3.600	0,04	420	0,03	3.180	0,04
11	Banten	190.950	2,14	12.710	0,8	178.240	2,44
12	Jawa Barat	1.109.560	12,5	15.240	0,96	1.094.320	14,96
13	Jawa Tengah	1.124.940	12,6	331.910	20,89	793.030	10,84
14	DI Yogyakarta	65.630	0,74	620	0,04	65.010	0,89
15	Jawa Timur	1.332.420	15	75.410	11,04	1.157.010	15,82
16	Bali	106.270	1,19	5.810	0,37	100.460	1,37
	Jawa & Bali	3.933.370	44,2	542.120	34,13	3.391.250	46,36
17	Kalimantan Barat	426.160	4,79	155.540	9,79	270.620	3,7
18	Kalimantan Tengah	295.460	3,32	1.920	0,12	293.540	4,01
19	Kalimantan Selatan	466.260	5,24	184.200	11,6	282.060	3,86
20	Kalimantan Timur	65.250	0,73	33.540	2,11	31.710	0,43
	Kalimantan	1.253.130	14,1	375.200	23,62	877.930	12
21	Gorontalo	43.460	0,49	19.740	1,24	23.720	0,32
22	Sulawesi Utara	29.000	0,33	-	-	29.000	0,33
23	Sulawesi Tengah	113.900	1,28	360	0,02	113.540	1,55
24	Sulawesi Selatan	715.270	8,03	99.740	6,28	615.530	8,41
25	Sulawesi Tenggara	80.780	0,91	4.430	0,28	76.350	1,04
	Sulawesi	982.410	11	124.270	7,82	858.140	11,73
26	Nusa Tenggara Barat	248.980	2,8	4.040	0,25	244.940	3,35
27	Nusa Tenggara Timur	155.500	1,75	63.010	3,97	92.490	1,26
28	Maluku	78.230	0,88	-	-	78.230	1,07
29	Maluku Utara	83.390	0,94	-	-	83.390	1,14
	Nusa Tenggara & Maluku	566.100	6,36	67.050	4,22	499.050	6,82
30	Papua	131.520	1,48	65.060	4,1	66.460	0,91
	Total Nasional	8.903.220	100	1.588.480	17,84	7.314.740	82,16

Sumber: Direktorat Penatagunaan Tanah, Badan Pertanahan Nasional (2012)

1) Pola dan Karakteristik Alih Fungsi Lahan

Sumaryo dan Tahlim (2005) mengungkapkan bahwa pola konversi lahan dapat ditinjau dalam beberapa aspek. Pertama, alih fungsi lahan yang dilakukan secara langsung oleh pemilik lahan yang bersangkutan. Motif dari pemilik lahan pertanian untuk merubah penggunaan lahannya antara lain, karena pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal dan peningkatan pendapatan melalui alih usaha. Sebagaimana diketahui para petani umumnya berpendapatan sedikit karena

kebijakan pemerintah dalam pengaturan harga komoditas pertanian yang kurang bijak dibandingkan dengan harga input pertanian yang tinggi. Sehingga mereka cenderung membuat tempat tinggal untuk keturunannya atau membuat usaha lain dengan mengalihfungsikan lahan pertanian milik mereka sendiri. Dampak dari alih fungsi ini akan baru terasa dalam jangka waktu yang lama. Kedua, alih fungsi lahan yang diawali dengan alih penguasaan lahan. Pemilik lahan menjual kepada pihak lain yang akan memanfaatkannya untuk usaha non pertanian. Para petani yang cenderung berpendapatan kecil akan menjual lahannya karena tergiur akan harga lahan yang ditawarkan oleh para investor. Secara empiris, alih fungsi lahan melalui cara ini umumnya berkorelasi positif dengan proses urbanisasi (pengkotaan). Dampak alih fungsi lahan terhadap eksistensi lahan pertanian dengan pola ini berlangsung cepat dan nyata.

Menurut Utomo (1992) alih fungsi lahan pertanian dapat bersifat sementara dan bersifat permanen. Jika lahan sawah berubah menjadi perkebunan maka alih fungsi lahan tersebut bersifat sementara, karena pada tahun-tahun berikutnya dapat dijadikan sawah kembali. Sedangkan jika lahan sawah berubah menjadi pemukiman atau industri maka alih fungsi lahan tersebut bersifat permanen. Alih fungsi lahan yang bersifat permanen memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan alih fungsi lahan yang bersifat sementara.

Konversi lahan atau alihfungsi lahan menurut Sihaloho (2004), terbagi kedalam tujuh pola atau tipologi, antara lain:

1. Konversi gradual berpola sporadis: dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu lahan yang kurang/tidak produktif dan keterdesakan ekonomi pelaku konversi.
2. Konversi sistematis berpola "enclave": dikarenakan lahan kurang produktif, sehingga konversi dilakukan secara serempak untuk meningkatkan nilai tambah.
3. Konversi lahan sebagai respon atas pertumbuhan penduduk (*population growth driven land conversion*): lebih lanjut disebut konversi adaptasi demografi, dimana dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk, lahan terkonsversi untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal.
4. Konversi yang disebabkan oleh masalah sosial (*social problem driven land conversion*): disebabkan oleh dua faktor yakni keterdesakan ekonomi dan perubahan kesejahteraan.
5. Konversi tanpa beban: dipengaruhi oleh faktor keinginan untuk mengubah hidup yang lebih baik dari keadaan saat ini dan ingin keluar dari kampung.
6. Konversi adaptasi agraris: disebabkan karena keterdesakan ekonomi dan keinginan untuk berubah dari masyarakat dengan tujuan meningkatkan hasil pertanian.
7. Konversi multi bentuk atau tanpa bentuk: konversi dipengaruhi oleh berbagai faktor, khususnya faktor peruntukan untuk perkantoran, sekolah, koperasi, perdagangan, termasuk sistem waris yang tidak dijelaskan dalam konversi demografi.

Menurut Friyanto (2004), Pada tingkatan mikro, proses alih fungsi lahan pertanian (konversi lahan) dapat dilakukan oleh petani sendiri atau dilakukan oleh pihak lain. Alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pihak lain memiliki dampak yang lebih besar terhadap penurunan kapasitas. Produksi pangan karena proses

alih fungsi lahan tersebut biasanya mencakup hamparan lahan yang cukup luas, terutama ditujukan untuk pembangunan kawasan perumahan. Proses alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pihak lain tersebut biasanya berlangsung melalui dua tahapan, yaitu: (a) Pelepasan hak pemilikan lahan petani kepada pihak lain (b) Pemanfaatan lahan tersebut untuk kegiatan non pertanian.

Beberapa kasus menunjukkan jika di suatu lokasi terjadi alih fungsi lahan, maka dalam waktu yang tidak lama lahan di sekitarnya juga beralih fungsi secara progresif. Menurut Irawan (2005), hal tersebut disebabkan oleh dua faktor. Pertama, sejalan dengan pembangunan kawasan perumahan atau industri di suatu lokasi alih fungsi lahan, maka aksesibilitas di lokasi tersebut menjadi semakin kondusif untuk pengembangan industri dan pemukiman yang akhirnya mendorong meningkatnya permintaan lahan oleh investor lain atau spekulasi tanah sehingga harga lahan di sekitarnya meningkat. Kedua, peningkatan harga lahan selanjutnya dapat merangsang petani lain di sekitarnya untuk menjual lahan.

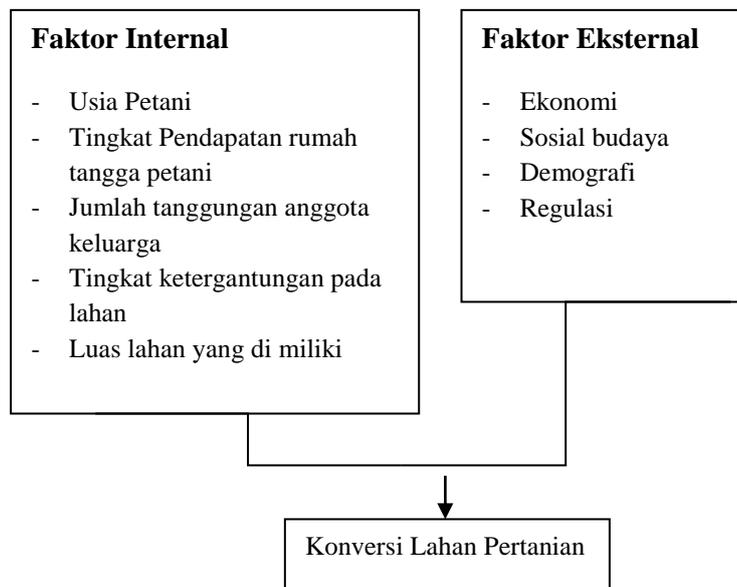
2) **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian**

Laju penggunaan lahan akan semakin meningkat seiring dengan pembangunan pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya permintaan akan lahan mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Menurut Pakpahan *et. al* (1993), faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian dapat dibedakan menjadi dua yaitu faktor langsung dan tak langsung. Faktor langsung atau mikro yaitu faktor konversi ditingkat petani dimana faktor tersebut mempengaruhi langsung keputusan petani. Faktor tersebut antara lain kondisi sosial ekonomi petani, seperti pendidikan, pendapatan, kemampuan secara ekonomi, pajak tanah, harga tanah, dan lokasi tanah. Sedangkan faktor tak langsung atau makro yaitu faktor konversi ditingkat wilayah dimana faktor tersebut tidak secara langsung mempengaruhi keputusan petani. Faktor ini mempengaruhi faktor-faktor lain yang nantinya berpengaruh terhadap keputusan petani. Faktor tersebut antara lain seperti pertumbuhan penduduk yang mempengaruhi pertumbuhan pembangunan pemukiman dan perubahan struktur ekonomi ke arah industri dan jasa yang akan meningkatkan kebutuhan akan sarana transportasi dan lahan untuk industri.

Menurut Nasoetion dan Winoto (1996), proses alih fungsi lahan secara langsung dan tidak langsung ditentukan oleh dua faktor, yaitu sistem kelembagaan yang dikembangkan oleh masyarakat dan pemerintah dan sistem non kelembagaan yang berkembang secara alamiah dalam masyarakat. Sedangkan Utomo (1992) memaparkan bahwa secara umum masalah alih fungsi dalam penggunaan lahan terjadi antara lain karena pola pemanfaatan lahan yang masih sektoral, delineasi antar kawasan yang belum jelas, kriteria kawasan yang belum jelas, koordinasi pemanfaatan ruang yang masih lemah, dan penegakan hukum seperti UUPA (Undang-undang Pokok Agraria) yang masih lemah. Menurut Winoto (2005) faktor-faktor yang mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian antara lain:

1. Faktor kependudukan, yaitu peningkatan dan penyebaran penduduk di suatu wilayah. Pesatnya peningkatan jumlah penduduk telah meningkatkan

- permintaan tanah. Selain itu, peningkatan taraf hidup masyarakat juga turut berperan menciptakan tambahan permintaan lahan.
2. Faktor ekonomi, yaitu tingginya *land rent* yang diperoleh aktifitas sektor non pertanian dibandingkan dengan sektor pertanian. Rendahnya insentif untuk bertani disebabkan tingginya biaya produksi, sementara harga hasil pertanian relatif rendah dan berfluktuasi. Selain itu karena faktor kebutuhan keluarga petani yang semakin mendesak menyebabkan terjadinya konversi lahan.
 3. Faktor sosial budaya, antara lain keberadaan hukum waris yang menyebabkan terfragmentasinya tanah pertanian, sehingga tidak memenuhi batas minimum skala ekonomi usaha yang menguntungkan.
 4. Perilaku myopic, yaitu mencari keuntungan jangka pendek namun kurang memperhatikan jangka panjang dan kepentingan nasional secara keseluruhan. Hal ini tercermin dari rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang cenderung mendorong konversi tanah pertanian untuk penggunaan tanah non pertanian.
 5. Lemahnya sistem perundang-undangan dan penegakan hukum dari peraturan yang ada.



Gambar 4. Diagram Faktor Eksternal Internal Pemicu Konversi Lahan Pertanian

3) Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian

Proses alih fungsi lahan di satu sisi menambah terbukanya lapangan kerja di sektor non-pertanian seperti jasa konstruksi dan industri, akan tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang kurang menguntungkan. Menurut Widjanarko, *et al* (2006) dampak negatif akibat alih fungsi lahan, antara lain :

1. Berkurangnya luas lahan sawah yang mengakibatkan turunnya produksi padi, yang mengganggu tercapainya swasembada pangan.
2. Berkurangnya luas sawah yang mengakibatkan bergesernya lapangan kerja dari sektor pertanian ke non pertanian dimana tenaga kerja lokal nantinya akan bersaing dengan pendatang. Dampak sosial ini akan berkembang dengan meningkatnya kecemburuan sosial masyarakat setempat terhadap pendatang yang nantinya akan berpotensi meningkatkan konflik sosial.
3. Investasi pemerintah dalam pengadaan prasarana dan sarana pengairan menjadi tidak optimal. Hal ini dikarenakan irigasi yang telah dibangun menjadi sia-sia karena sawah yang ada dialihfungsikan.
4. Kegagalan investor dalam melaksanakan pembangunan perumahan ataupun industri karena kesalahan perhitungan mengakibatkan lahan yang telah dialihfungsikan menjadi tidak termanfaatkan, karena tidak mungkin dikembalikan menjadi sawah kembali. Sehingga luas lahan tidur akan meningkat dan nantinya akan menimbulkan konflik sosial seperti penjarahan tanah.
5. Berkurangnya ekosistem sawah di Pulau Jawa dimana telah terbentuk selama berpuluh-puluh tahun, sedangkan pencetakan sawah baru di luar Pulau Jawa tidak memuaskan hasilnya.

Secara umum dampak alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang akan langsung berimplikasi dan dirasakan oleh masyarakat luas adalah terancamnya ketahanan pangan. Hal ini disebabkan produksi pertanian yang tadinya dapat di penuhi dan dihasilkansendiri oleh pertanian lokal menjadi berkurang akibat berkurangnya lahan pertanian.

Kerugian lain akibat konversi lahan sawah dari fungsinya lahan sawah yang diperuntukan memproduksi padi adalah turunnya produksi padi nasional. Juga kerugian berupa investasi, dimana tentunya sudah banyak modal dari proses diinvestasikannya dana untuk mencetak sawah, membangun waduk, dan sistem irigasi. Alihfungsi lahan sawah ke penggunaan lain telah menjadi salah satu ancaman yang serius terhadap keberlanjutan swasembada pangan. Kegiatan alih fungsi lahan pertanian juga berpengaruh terhadap lingkungan. Perubahan lahan pertanian menjadi non pertanian akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Secara faktual alih fungsi lahan ini menyebabkan berkurangnya lahan terbuka hijau, mengganggu tata air tanah, serta ekosistem budidaya pertanian semakin sempit.

Menurut Friyanto (2004) dampak alih fungsi lahan pertanian dapat dipandang dari dua sisi, yaitu: pertama, dari sisi fungsinya, lahan sawah diperuntukan untuk memproduksi padi, sehingga adanya alih fungsi lahan pertanian ke fungsi lain akan menyebabkan menurunnya produksi padi nasional yang mengakibatkan terancamnya ketahanan pangan nasional. Kedua, dari bentuknya perubahan lahan pertanian ke permukiman, perkantoran, prasarana jalan, industri dan jasa berimplikasi pada besarnya kerugian akibat sudah diinvestasikannya dana untuk mencetak sawah, membangun waduk dan sistem irigasi.

Widjanarko *et al* (2006), menjelaskan dampak negatif akibat alihfungsi lahan adalah ancaman terhadap kualitas lingkungan. Lahan pertanian tidak hanya

berfungsi sebagai tempat untuk budidaya padi, tetapi dapat menjadi lahan yang efektif untuk menampung kelebihan air limpasan, pengendali banjir dan pelestarian lingkungan. Apabila sehamparan lahan sawah beralihfungsi untuk pembangunan kawasan perumahan, hotel atau industri maka dengan sendirinya lahan disekitarnya akan terkena pengaruh dari konversi tersebut. Lahan untuk menampung kelebihan air akan semakin berkurang sehingga bencana seperti banjir akan semakin sering terjadi.

KESIMPULAN

1. Alih fungsi lahan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dapat bersifat sementara maupun permanen, dapat berupa konversi gradual berpola sporadic, Konversi sistematis berpola “enclave”, Konversi lahan sebagai respon atas pertumbuhan penduduk, Konversi yang disebabkan oleh masalah social, Konversi tanpa beban dan Konversi adaptasi agraris.
2. Konversi lahan di pengaruhi oleh faktor eksternal antara lain ekonomi, sosial budaya, peningkatan jumlah penduduk serta regulasi sedangkan faktor internal seperti lahan yang kurang produktif dan desakan ekonomi petani.
3. Konversi lahan pertanian mempunyai dampak positif berupa peningkatan investasi di sektor non pertanian tetapi mempunyai dampak negatif terhadap terancamnya ketahanan pangan nasional dan turunnya kualitas lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat, 2001. Luasan Lahan Pertanian Indonesia. Jakarta Pusat. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat, 2010. Jumlah penduduk Indonesia. Jakarta Pusat. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pertanahan Nasional 2012. Luas Lahan Sawah Indonesia 2012. Jakarta Pusat. BPN.
- Friyanto S. 2004. *Dampak Konversi Lahan Sawah di Jawa Terhadap Produksi Beras dan Kebijakan Pengendaliannya. Jurnal Sosial-Ekonomi Pertanian dan Agribisnis SOCA: Vol.2 Nomor 2:79-95.* Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Denpasar.
- Irawan, Bambang (2005). *Konversi Lahan Sawah: Potensi Dampak, Pola Pemanfaatannya dan Faktor determinan.* Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 23 No. 1.
- Nasoetion L dan Winoto. 1996. *Masalah Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Dampaknya Terhadap Keberlangsungan Swasembada Pangan.* Prosiding Lokakarya Persaingan Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Lahan dan Air:6482. Hasil kerjasama PPSEP dengan Ford Foundation. Bogor.

- Pakpahan A. 1993. *Analisis Masalah Konversi Lahan Sawah Menjadi Lahan Non Pertanian*. Makalah Seminar Ilmiah Dalam Rangka Lustrum Universitas Jember, Jember. <http://pse.litbang.deptan>. (Diakses 10 September 2019).
- Prabowo, Rossi (2010). “*Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Indonesia*” Jurnal Mediagro Vol 6. No.2 2010. Hal 62-73.
- Sihaloho, 2004. “*Konversi Lahan Pertanian Dan Perubahan Struktur Agraria*”Bogor: Program Pascasarjana Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor.
- Sumaryo, S Tahlim. 2005. *Pemahaman Dampak Negatif Konversi Lahan Sawah Sebagai Landasan Perumusan Strategi Pengendaliannya*. Prosiding Seminar Penanganan Konversi Lahan dan Pencapaian Pertanian Abadi. LPPM IPB: Bogor.
- Syafa’at, dkk. 2001. *Kajian Penyebab Penurunan Produksi Padi Tahun 2001 di Indonesia*. Laporan Hasil Penelitian: Analisis Kebijaksanaan Pembangunan Pertanian Respon Terhadap Issu Aktual. PPSEP, Departemen Pertanian, Bogor. <http://pse.litbang.deptan> . (Diakses 10 September 2019).
- Ruswandi A. 2005. Dampak Konversi Lahan Pertanian Terhadap Perubahan Kesejahteraan Petani Dan Perkembangan Wilayah. *Tesis*. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Utomo, M., Eddy Rifai dan Abdulmutalib Thahir. 1992. *Pembangunan dan Alih Fungsi Lahan*. Lampung: Universitas Lampung.
- Widjanarko, et al, 2006. *Aspek Pertahanan Dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian (Sawah)*. Prosiding Seminar Nasional Multifungsi Lahan Sawah : 22-23. Pusat Penelitian dan Pengembangan BPN. Jakarta.
- Winoto. 2005. Fakta Alih Fungsi Lahan. Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara.
- Witjaksono, R. 1996. *Alih Fungsi Lahan: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Dalam *Prosiding Lokakarya “Persaingan Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Lahan dan Air”*: Dampaknya terhadap Keberlanjutan Swasembada Beras: 113 - 120. Hasil Kerja sama Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian dengan Ford Foundation. Bogor.